

KATA PENGANTAR

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tingkat Kementerian meliputi dokumen :

1. Dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian yang ditandatangani oleh Menteri.
2. Dokumen Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja (Eselon I) yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Menteri
3. Dokumen Perjanjian Kinerja di tingkat satuan kerja yang ditandatangani oleh Pimpinan satuan kerja dan pimpinan unit kerja.

Semoga dengan tersusunya dokumen Perjanjian Kinerja 2015 Kementerian PP dan PA ini, dapat turut mendorong peningkatan kinerja Kementerian PP dan PA. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian PP dan PA yang telah membantu penyusunan dokumen penetapan Kinerja Kementerian PP dan PA.

Jakarta, Januari 2015

a.n. Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Sekretaris Kementerian

Nomor : B- /MPP-PA/Roren/03/2015
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Dokumen Perjanjian Kinerja 2015
Kementerian PP dan PA

Juni 2015

Kepada Yth.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi

di

Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih.

Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling., MA.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dipl. Apling., MA

Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2015

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling., MA



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
KEMENTERIAN PEKERJAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsive gender di bidang ekonomi	Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan PUG di Bidang Ekonomi di Tingkat Nasional dan Daerah	5 Dokumen/ Kebijakan
2.	Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang polsoskum	Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan PUG Di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum di Tingkat Nasional dan Daerah	10 Dokumen/ Kebijakan
3.	Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan	Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan	9 Dokumen/ Kebijakan
4.	Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diterapkan	13 Dokumen/ Kebijakan
		2. Jumlah KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak	6 Instansi
5.	Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak perlindungan anak yang diterapkan	9 Dokumen/ Kebijakan
		2. Jumlah KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak	2 Instansi
		3. Persentase kabupaten/kota menuju KLA	55%
6.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase (%) rencana program dan anggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis	100%
		2. Persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel	100%



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		3. Persentase (%) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum	100%

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA Rp. 92.367.499.000,-
2. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Rp. 67.466.600.000,-
3. Program Perlindungan Anak Rp. 57.885.800.000,-

Jakarta, Januari 2015

Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dipl. Apling., MA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dipl. Apling., MA**

Jabatan : **Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc
NIP. 19550627.198103.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi	1. Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan PUG di Bidang Ekonomi di Tingkat Nasional dan Daerah	

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur yang Responsif Gender	Rp. 3.690.000.000,-
2. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Iptek dan Sumber Daya Ekonomi yang Responsif Gender	Rp. 3.150.000.000,-
3. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan yang Responsif Gender	Rp. 4.300.000.000,-
4. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan yang Responsif Gender	Rp. 4.905.000.000,-
5. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang Responsif Gender	Rp. 3.693.600.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc
NIP. 19550627.198103.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. M.A.Budi Prabowo**

Jabatan : **Asisten Deputy Gender dalam Infrastruktur**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc
NIP. 19550627.198103.2.001

Drs. M.A.Budi Prabowo
NIP. 19620921.198903.1.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI GENDER DALAM INFRASTRUKTUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang Infrastruktur yg Responsif Gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Infrastruktur yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	1 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG di bidang Infrastruktur	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	25% (1 Dokumen)
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Infrastruktur	2 Model
		4. Persentase K/L bidang Infrastruktur dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG	20% (1 K/L, 2 Pemda)
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Infrastruktur yg distandarisasi	20% (1 Lembaga, 25 SDM)
3.	Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System Data K/L & Pemda	6. Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang Infrastruktur	30% (1 K/L, 1 Pemda)
4.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah	7. Persentase data terpilah di K/L bidang Infrastruktur dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan	30% (1 K/L, 2 Pemda)
5.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur	8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Infrastruktur dan Pemda yg ditindaklanjuti	30% (1 Laporan)

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur yang Responsif Gender

Rp. 3.690.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc
NIP. 19550627.198103.2.001

Drs. M.A.Budi Prabowo
NIP. 19620921.198903.1.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Bambang Kristiono, M. Si**

Jabatan : **Asisten Deputi Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc
NIP. 19550627.198103.2.001

Drs. Bambang Kristiono, M. Si
NIP. 19560530.198303.1.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI GENDER DALAM ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Rumusan kebijakan Nasional di bidang Iptek dan sumber daya yg Responsif Gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Iptek dan sumber daya yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	1 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG di bidang Iptek dan sumber daya	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Iptek dan sumber daya yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	33,33 % (1 Dokumen)
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Iptek dan sumber daya	1 Model
		4. Persentase K/L bidang Iptek dan sumber daya dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG	25% (1 K/L, 2 Pemda)
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Iptek dan sumber daya yg distandarisasi	25% (1 Lembaga, 25 SDM)
3.	Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System Data K/L & Pemda	6. Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang Iptek dan sumber daya	25% (1 K/L, 1 Pemda)
4.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah	7. Persentase data terpilah di K/L bidang Iptek dan sumber daya dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan	25% (1 K/L, 2 Pemda)
5.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang Iptek dan sumber daya	8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Iptek dan sumber daya dan Pemda yg ditindaklanjuti	33,33 % (1 Laporan)

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Iptek dan Sumber Daya Ekonomi yang Responsif Gender Rp. 3.150.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc
NIP. 19550627.198103.2.001

Drs. Bambang Kristiono, M. Si
NIP. 19560530.198303.1.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir.Priyadi Santoso, M.Si**

Jabatan : **Asisten Deputi Gender dalam Ketenagakerjaan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc
NIP. 19550627.198103.2.001

Ir. Priyadi Santoso, M.Si
NIP. 19680705.199312.1.002



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang Ketenagakerjaan yg Responsif Gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Ketenagakerjaan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	1 Kebijakan
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG di bidang Ketenagakerjaan	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Ketenagakerjaan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	33,33 % (1 Dokumen)
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Ketenagakerjaan	2 Model
		4. Persentase K/L bidang Ketenagakerjaan dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG	33,33 % (1 K/L, 1 Pemda)
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Ketenagakerjaan yg distandarisasi	20% (1 Lembaga, 25 SDM)
3.	Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System Data K/L & Pemda	6. Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang Ketenagakerjaan	33,33 % (1 K/L, 1 Pemda)
4.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah	7. Persentase data terpilah di K/L bidang Ketenagakerjaan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan	20% (1 K/L, 2 Pemda)
5.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang Ketenagakerjaan	8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Ketenagakerjaan dan Pemda yg ditindaklanjuti	33,33 % (2 Laporan)

KEGIATAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan yang Responsif Gender

ANGGARAN

Rp. 4.300.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc
NIP. 19550627.198103.2.001

Ir. Priyadi Santoso, M.Si
NIP. 19680705.199312.1.002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra.Sunarti,M.Sc**

Jabatan : **Asisten Deputi Gender dalam KUKM dan Industri dan Perdagangan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc
NIP. 19550627.198103.2.001

Dra.Sunarti,M.Sc
NIP. 19581008.198703.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI GENDER DALAM KUKM DAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg Responsif Gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	1 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan PUG di bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	25 % (1 Dokumen)
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan	2 Model
		4. Persentase K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG	20% (1 K/L, 1 Pemda)
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg distandarisasi	20% (1 Lembaga, 25 SDM)
3.	Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System Data K/L & Pemda	6. Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan	25% (1 K/L, 1 Pemda)
4.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah	7. Persentase data terpilah di K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan	20% (1 K/L, 2 Pemda)
5.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan	8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan dan Pemda yg ditindaklanjuti	25% (2 Laporan)

KEGIATAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan yang Responsif Gender

ANGGARAN

Rp. 4.905.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc
NIP. 19550627.198103.2.001

Dra.Sunarti,M.Sc
NIP. 19581008.198703.2.001.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra.Eko Novi Ariyanti,R.D.M.Si**

Jabatan : **Asisten Deputy Gender dalam Pertanian, Kehutanan Perikanan dan Kelautan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc
NIP. 19550627.198103.2.001

Dra.Eko Novi Ariyanti,R.D.M.Si
NIP. 19671105.199312.2.002



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

**ASISTEN DEPUTI
GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN PERIKANAN DAN KELAUTAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yg Responsif Gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	1 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	33,33% (1 Dokumen)
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis	2 Model
		4. Persentase K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG	20% (1 K/L, 2 Pemda)
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yg distandarisasi	20% (1 Lembaga, 25 SDM)
3.	Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System Data K/L & Pemda	6. Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis	25% (1 K/L, 1 Pemda)
4.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah	7. Persentase data terpilah di K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan	20% (1 K/L, 2 Pemda)
5.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis	8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis dan Pemda yg ditindaklanjuti	25% (2 Laporan)



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang Responsif Gender	Rp. 3.693.600.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M.Sc
NIP. 19550627.198103.2.001

Dra. Eko Novi Ariyanti, R.D.M.Si
NIP. 19671105.199312.2.002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr.Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dipl. Apling., MA**

Jabatan : **Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

Dr.Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc
NIP. 19570221.198103.1.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLITIK, SOSIAL DAN HUKUM

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang polsoskum	1. Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan PUG Di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum di Tingkat Nasional dan Daerah	10 Dokumen / Kebijakan

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Hukum yang Responsif Gender	Rp. 3.150.000.000,-
2. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Kesehatan yang Responsif Gender	Rp. 3.300.000.000,-
3. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang Responsif Gender	Rp. 3.240.000.000,-
4. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	Rp. 2.853.000.000,-
5. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Responsif Gender	Rp. 6.000.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc
NIP. 19570221.198103.1.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sri Prihatini Lestari Wijayanti,SH,MH**

Jabatan : **Asisten Deputi Gender dalam Hukum**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr.Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr.Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc
NIP. 19570221.198103.1.001

Sri Prihatini Lestari Wijayanti,SH,MH
NIP. 19620907.198803.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI GENDER DALAM HUKUM

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang Hukum yg Responsif Gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Hukum yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	1 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan PUG di bidang Hukum	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Hukum yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	20% (1 Dokumen)
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Hukum	1 Model
		4. Persentase K/L bidang Hukum dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG	20% (2 K/L, 2 Pemda)
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Hukum yg distandarisasi	-
3.	Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System Data K/L & Pemda	6. Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang Hukum	20% (2 K/L, 1 Pemda)
4.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah	7. Persentase data terpilah di K/L bidang Hukum dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan	20% (2 K/L, 1 Pemda)
5.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang Hukum	8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Hukum dan Pemda yg ditindaklanjuti	20% (3 Laporan, 2 K/L, 1 Pemda)

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Hukum yang Responsif Gender Rp. 3.150.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr.Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc
NIP. 19570221.198103.1.001

Sri Prihatini Lestari Wijayanti,SH,MH
NIP. 19620907.198803.2.001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. Dewi Yuni Muliati**

Jabatan : **Asisten Deputi Gender dalam Kesehatan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc
NIP. 19570221.198103.1.001

Ir. Dewi Yuni Muliati
NIP. 19590629.198703.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI GENDER DALAM KESEHATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Rumusan kebijakan Nasional di bidang Kesehatan yg Responsif Gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Kesehatan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	2 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan PUG di bidang Kesehatan	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Kesehatan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	20% (1 Dokumen)
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Kesehatan	1 Model
		4. Persentase K/L bidang Kesehatan dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG	20% (1 K/L, 2 Pemda)
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Kesehatan yg distandarisasi	-
3.	Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System Data K/L & Pemda	6. Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang Kesehatan	25% (1 K/L, 1 Pemda)
4.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah	7. Persentase data terpilah di K/L bidang Kesehatan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan	25% (1 K/L, 1 Pemda)
5.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang Kesehatan	8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Kesehatan dan Pemda yg ditindaklanjuti	25% (2 Laporan, 1 K/L, 1 Pemda)

KEGIATAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Kesehatan yang Responsif Gender

ANGGARAN

Rp. 3.300.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc
NIP. 19570221.198103.1.001

Ir. Dewi Yuni Muliati
NIP. 19590629.198703.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Ihsan, S. Ag, MA**

Jabatan : **Asisten Deputy Gender dalam Pendidikan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr.Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr.Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc
NIP. 19570221.198103.1.001

Muhammad Ihsan, S. Ag, MA
NIP. 19700625.199504.1.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI GENDER DALAM PENDIDIKAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang Pendidikan yg Responsif Gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pendidikan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	2 Kebijakan
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan PUG di bidang Pendidikan	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	20 % (1 Dokumen)
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Pendidikan	1 Model
		4. Persentase K/L bidang Pendidikan dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG	20 % (1 K/L, 2 Pemda)
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Pendidikan yg distandarisasi	20% (2 Lembaga, 30 SDM)
3.	Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System Data K/L & Pemda	6. Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang Pendidikan	33,33% (1 K/L, 1 Pemda)
4.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah	7. Persentase data terpilah di K/L bidang Pendidikan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan	33,33% (1 K/L, 1 Pemda)
5.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan	8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Pendidikan dan Pemda yg ditindaklanjuti	33,33% (2 Laporan)

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pendidikan yang Responsif Gender Rp. 3.240.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr.Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc
NIP. 19570221.198103.1.001

Muhammad Ihsan, S. Ag, MA
NIP. 19700625.199504.1.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. A Darsono. M.Si**

Jabatan : **Asisten Deputy Gender dalam Politik dan Pengambilan Keputusan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr.Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr.Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc
NIP. 19570221.198103.1.001

Dr. A. Darsono. M.Si
NIP. 19590613.198003.1.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI GENDER DALAM POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusnya Rumusan kebijakan Nasional di bidang Politik dan Pengambilan Keputusan yg Responsif Gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Politik dan Pengambilan Keputusan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	2 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan PUG di bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Politik dan Pengambilan Keputusan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	20 % (1 Dokumen)
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	1 Model
		4. Persentase K/L bidang Politik dan Pengambilan Keputusan dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG	20% (1 K/L, 2 Pemda)
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang Politik dan Pengambilan Keputusan yg distandarisasi	-
3.	Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System Data K/L & Pemda	6. Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	33% (1 K/L, 1 Pemda)
4.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah	7. Persentase data terpilah di K/L bidang Politik dan Pengambilan Keputusan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan	14% (1 K/L, 2 Pemda)
5.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Politik dan Pengambilan Keputusan dan Pemda yg ditindaklanjuti	14% (2 Laporan, 1 K/L, 1 Pemda)

KEGIATAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Politik dan Pengambilan Keputusan yang Responsif Gender

ANGGARAN

Rp. 2.853.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc
NIP. 19570221.198103.1.001

Dr. A. Darsono, M.Si
NIP. 19590613.198003.1.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Usman Basuni, SE, MA. MPHR**

Jabatan : **Asisten Deputi Gender Sumber Daya Alam dan Lingkungan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr.Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr.Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc
NIP. 19570221.198103.1.001

Usman Basuni, SE, MA. MPHR
NIP. 19630520.198803.1.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI GENDER DALAM SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang SDA dan Lingkungan yg Responsif Gender	1. Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang SDA dan Lingkungan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan	3 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan PUG di bidang SDA dan Lingkungan	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang SDA dan Lingkungan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait	33% (1 Dokumen)
		3. Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang SDA dan Lingkungan	2 Model
		4. Persentase K/L bidang SDA dan Lingkungan dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG	20% (1 K/L, 2 Pemda)
		5. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan bidang SDA dan Lingkungan yg distandarisasi	20% (6 Lembaga, 40 SDM)
3.	Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System Data K/L & Pemda	6. Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang SDA dan Lingkungan	20% (1 K/L, 1 Pemda)
4.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah	7. Persentase data terpilah di K/L bidang SDA dan Lingkungan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan	20% (1 K/L, 1 Pemda)
5.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan bidang SDA dan Lingkungan	8. Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L bidang SDA dan Lingkungan dan Pemda yg ditindaklanjuti	20% (2 Laporan, 1 K/L, 1 Pemda)

KEGIATAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang SDA dan Lingkungan yang Responsif Gender

ANGGARAN

Rp. 6.000.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr.Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc
NIP. 19570221.198103.1.001

Usman Basuni, SE, MA, MPHR
NIP. 19630520.198803.1.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mudjiati, S.H**

Jabatan : **Deputi Bidang Perlindungan Perempuan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dipl. Apling., MA**

Jabatan : **Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

Mudjiati, S.H
NIP. 19550406.198203.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan	1. Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan	

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penyusunan Data Gender	Rp. 3.450.000.000,-
2. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan	Rp. 4.445.000.000,-
3. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Masalah Sosial Perempuan	Rp. 3.890.000.000,-
4. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Korban Perdagangan Orang	Rp. 3.750.000.000,-
5. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Rp. 3.650.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Mudjiati, S.H
NIP. 19550406.198203.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Budi Mardaya, SE, MM**

Jabatan : **Asisten Deputi Informasi Gender**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Mudjiati, S.H**

Jabatan : **Deputi Bidang Bidang Perlindungan Perempuan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Mudjiati, S.H
NIP. 19550406.198203.2.001

Budi Mardaya, SE, MM
NIP. 19700221.199503.1.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI INFORMASI GENDER

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya pengelolaan sistem aplikasi dan jaringan sistem Informasi gender dan website	1. Persentase pengguna yang memanfaatkan system manajemen informasi pimpinan	10% (1 Org)
2.	Terlaksananya pemeliharaan dan pemantauan sistem aplikasi dan jaringan sistem informasi gender dan website	2. Persentase perangkat sistem aplikasi dan jaringan yang berfungsi dengan baik	100% (2 Sistem)
3.	Terlaksananya koordinasi analisis dan penyajian informasi gender dan anak	3. Persentase unit pengelola data yang membangun sistem data terpilah statistik gender dan anak	20% (9 K/L)
		4. Persentase unit pelaksana yang memanfaatkan data terpilah, statistik gender dan anak	20% (5 Unit)
4.	Terlaksananya fasilitasi analisis dan penyajian informasi gender dan anak	5. Jumlah Modul yang digunakan untuk pelatihan SDM pengelola data di K/L dan daerah tentang data terpilah, statistik gender dan anak	2 Modul
		6. Persentase fasilitator sistem data terpilah, statistic gender dan anak yang terlatih	20% (20 Orang)
5.	Publikasi Data dan Informasi Gender dan Anak	7. Jumlah Publikasi Profil gender, perempuan, anak	4 Publikasi
6.	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan penyajian informasi gender dan anak	8. Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan penyajian informasi gender dan anak yang disusun dan ditindaklanjuti	6 Laporan

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penyusunan Data Gender

Rp. 3.450.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Mudjiati, S.H
NIP. 19550406.198203.2.001

Budi Mardaya, SE, MM
NIP. 19700221.199503.1.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rohika Kurniadi Sari, SH. M.Si**

Jabatan : **Asisten Deputi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Mudjiati, S.H**

Jabatan : **Deputi Bidang Bidang Perlindungan Perempuan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Mudjiati, S.H
NIP. 19550406.198203.2.001

Rohika Kurniadi Sari, SH. M.Si
NIP. 19640415.199003.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya rumusan kebijakan nasional bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang responsif gender	1. Jumlah Kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	1 Dokumen
2.	Terlaksananya kordinasi pelaksanaan kebijakan PP dan PUG di bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait	20% (2 Dokumen)
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	1 Model
		4. Persentase K/L dan Pemda yang mengembangkan model pelaksanaan kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	20% (1 K/L, 2 Pemda)
		5. Persentase Lembaga dan SDM Penyedia Layanan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang distandarisasi	20% (20 SDM)
3.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah	6. Persentase data kekerasan di K/L dan Pemda bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dianalisis dan dimanfaatkan	20% (1 K/L, 2 Pemda)
4.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	7. Persentase laporan monev pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti	20% (3 Laporan)

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Rp. 4.445.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Mudjiati, S.H
NIP. 19550406.198203.2.001

Rohika Kurniadi Sari, SH,M,Si
NIP. 19640415.199003.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Sri Winarsih**

Jabatan : **Asisten Deputi Penanganan Masalah Sosial Perempuan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Mudjiati, S.H**

Jabatan : **Deputi Bidang Bidang Perlindungan Perempuan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Mudjiati, S.H
NIP. 19550406.198203.2.001

Dra. Sri Winarsih
NIP. 19560111.198303.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI PENANGANAN MASALAH SOSIAL PEREMPUAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya rumusan kebijakan nasional bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang responsif gender	1. Jumlah Kebijakan PP bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	2 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan PP dan PUG di bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait	20% (2 Dokumen)
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan PP bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan	4 Model
		4. Persentase K/L dan Pemda yang mengembangkan model pelaksanaan kebijakan PP bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan	20% (1 K/L)
		5. Persentase Lembaga dan SDM Penyedia Layanan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang distandarisasi	20% (3 Lembaga)
3.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilih	6. Persentase data kekerasan di K/L dan Pemda bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang dianalisis dan dimanfaatkan	25% (2 K/L)
4.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan	7. Persentase laporan monev pelaksanaan Penanganan Masalah Sosial Perempuan di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti	25% (2 Laporan)

KEGIATAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penanganan Masalah Sosial Perempuan

ANGGARAN

Rp. 3.890.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Mudjiati, S.H
NIP. 19550406.198203.2.001

Dra. Sri Winarsih
NIP. 19560111.198303.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Niken Kiswandari, M.Si**

Jabatan : **Asisten Deputi Perlindungan Korban Perdagangan Orang**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Mudjiati, S.H**

Jabatan : **Deputi Bidang Bidang Perlindungan Perempuan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Mudjiati, S.H
NIP. 19550406.198203.2.001

Dra.Niken Kiswandari, M.Si
NIP. 19540722.197903.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya rumusan kebijakan nasional bidang Perlindungan Korban Perdagangan Orang yang responsif gender	1. Jumlah Kebijakan PP bidang Perlindungan Korban Perdagangan Orang yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	3 Dokumen
2.	Terlaksananya kordinasi pelaksanaan kebijakan PP dan PUG di bidang Perlindungan Korban Perdagangan Orang	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Perlindungan Korban Perdagangan Orang yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait	20% (2 Dokumen)
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan PP bidang Perlindungan Korban Perdagangan Orang	-
		4. Persentase K/L dan Pemda yang mengembangkan model pelaksanaan kebijakan PP bidang Perlindungan Korban Perdagangan Orang	-
		5. Persentase Lembaga dan SDM Penyedia Layanan bidang Perlindungan Korban Perdagangan Orang yang distandarisasi	-
3.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilih	6. Persentase data kekerasan di K/L dan Pemda bidang Perlindungan Korban Perdagangan Orang yang dianalisis dan dimanfaatkan	25% (5 K/L, 1 Pemda)
4.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang Perlindungan Korban Perdagangan Orang	7. Persentase laporan monev pelaksanaan Perlindungan Korban Perdagangan Orang di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti	25% (6 Laporan)

KEGIATAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Korban Perdagangan Orang

ANGGARAN

Rp. 3.750.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Mudjiati, S.H
NIP. 19550406.198203.2.001

Dra.Niken Kiswandari, M.Si
NIP. 19540722.197903.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir.Lies Rosdianty, M.Si**

Jabatan : **Asisten Deputi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Mudjiati, S.H**

Jabatan : **Deputi Bidang Bidang Perlindungan Perempuan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Mudjiati, S.H
NIP. 19550406.198203.2.001

Ir.Lies Rosdianty, M.Si
NIP. 19631018.198601.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya rumusan kebijakan nasional bidang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan yang responsif gender	1. Jumlah Kebijakan PP bidang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	2 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan PP dan PUG di bidang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	2. Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait	20% (2 Dokumen)
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan PP bidang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	-
		4. Persentase K/L dan Pemda yang mengembangkan model pelaksanaan kebijakan PP bidang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	20% (2 K/L, 2 Pemda)
		5. Persentase Lembaga dan SDM Penyedia Layanan bidang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan yang distandarisasi	-
3.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilih	6. Persentase data kekerasan di K/L dan Pemda bidang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan yang dianalisis dan dimanfaatkan	20% (2 K/L, 3 Pemda)
4.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	7. Persentase laporan monev pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti	20% (4 Laporan)

KEGIATAN

ANGGARAN

2. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Rp. 3.650.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Mudjiati, S.H
NIP. 19550406.198203.2.001

Ir.Lies Rosdianty, M.Si
NIP. 19631018.198601.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang Perlindungan Anak**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dipl. Apling., MA**

Jabatan : **Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diterapkan	
		2. Jumlah KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak	

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Untuk Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	Rp. 4.730.000.000,-
2. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus	Rp. 2.550.000.000,-
3. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil Anak	Rp. 4.350.000.000,-
4. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak	Rp. 4.300.000.000,-
5. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang Masalah Sosial Anak	Rp. 2.900.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ali Khasan, SH.,M.Si**

Jabatan : **Asisten Deputi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang Bidang Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001

Ali Khasan, SH.,M.Si
NIP. 19630906.199303.1.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya rumusan kebijakan Penanganan ABH	1. Jumlah kebijakan Penanganan ABH yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	3 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH	2. Persentase kebijakan Penanganan ABH yang terkoordinasi antar KL dan Pemda	20% (1 Dokumen)
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH	-
		4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH	-
		5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH	-
		6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Penanganan ABH yang distandarisasi	-
3.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah Penanganan ABH	7. Jumlah Laporan survai bidang Penanganan ABH	1 Laporan
		8. Persentase sub sistem data bidang Penanganan ABH	20% (1 Sub Sistem)
4.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan Penanganan ABH	9. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan ABH yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Untuk Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum | Rp. 4.730.000.000,- |
|--|---------------------|

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001

Ali Khasan, SH.,M.Si
NIP. 19630906.199303.1.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. Nurti Mukti Wibawati**

Jabatan : **Asisten Deputi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang Bidang Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001

Ir. Nurti Mukti Wibawati
NIP. 19580411.198303.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya rumusan kebijakan Penanganan ABK	1. Jumlah kebijakan Penanganan ABK yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	1 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan Penanganan ABK	2. Persentase kebijakan Penanganan ABK yang terkoordinasi antar KL dan Pemda	20% (1 Dokumen)
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABK	-
		4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABK	6 Instansi (.....K/L, Pemda)
		5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABK	-
		6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Penanganan ABK yang distandarisasi	25% (24 SDM)
3.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah Penanganan ABK	7. Jumlah Laporan survai bidang Penanganan ABK	1 Laporan
		8. Persentase sub sistem data bidang Penanganan ABK	-
4.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan Penanganan ABK	9. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan ABK yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan

KEGIATAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus

ANGGARAN

Rp. 2.550.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001

Ir. Nurti Mukti Wibawati
NIP. 19580411.198303.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasan, SH**

Jabatan : **Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Anak**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang Bidang Perlindungan Perempuan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001

Hasan, SH
NIP. 19600708.198503.1.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI PEMENUHAN HAK SIPIL ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya rumusan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak	1. Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	5 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak	2. Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda	20% (1 Dokumen)
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak	-
		4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak	6 Instansi (.....K/L, Pemda)
		5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak	-
		6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak Sipil Anak yang distandarisasi	25% (24 SDM)
		7. Jumlah Laporan survai bidang Pemenuhan Hak Sipil Anak	1 Laporan
3.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah Pemenuhan Hak Sipil Anak	8. Persentase sub sistem data bidang Pemenuhan Hak Sipil Anak	-
		9. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Sipil Anak yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan
4.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan Pemenuhan Hak Sipil Anak		

KEGIATAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil Anak

ANGGARAN

Rp. 4.350.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001

Hasan, SH
NIP. 19600708.198503.1.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. Agustina Erni Susiyanti, M.Sc**

Jabatan : **Asisten Deputi Penanganan Kekerasan Terhadap Anak**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang Bidang Perlindungan Perempuan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001

Ir. Agustina Erni Susiyanti, M.Sc
NIP. 19620824.198702.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya rumusan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak	1. Jumlah kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	5 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak	2. Persentase kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda	20% (2 Dokumen)
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak	1 Model
		4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak	2 Instansi (.....K/L, Pemda)
		5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak	-
		6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang distandarisasi	24% (8 Lembaga)
3.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah Penghapusan Kekerasan pada Anak	7. Jumlah Laporan survai bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak	3 Laporan
		8. Persentase sub sistem data bidang Penghapusan Kekerasan pada Anak	17% (4 Sub Sistem)
4.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan Penghapusan Kekerasan pada Anak	9. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penghapusan Kekerasan pada Anak yang diselesaikan tepat waktu	2 Laporan

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak Rp. 4.300.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001

Ir. Agustina Erni Susiyanti, M.Sc
NIP. 19620824.198702.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Maydian Werdiastuti, M.Si**

Jabatan : **Asisten Deputi Penanganan Masalah Sosial Anak**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang Bidang Perlindungan Perempuan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001

Dra. Maydian Werdiastuti, M.Si
NIP. 19630509.198811.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI PENANGANAN MASALAH SOSIAL ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya rumusan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak	1. Jumlah kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	3 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak	2. Persentase kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda	20% (1 Dokumen)
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak	- Model
		4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak	- Instansi
		5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak	%
		6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Penanganan Masalah Sosial Anak yang distandarisasi	1 Lembaga
3.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah Penanganan Masalah Sosial Anak	7. Jumlah Laporan survai bidang Penanganan Masalah Sosial Anak	2 Laporan
		8. Persentase sub sistem data bidang Penanganan Masalah Sosial Anak	25% (1 Sub Sistem)
4.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan Penanganan Masalah Sosial Anak	9. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial Anak yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang Masalah Sosial Anak Rp. 2.900.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc
NIP. 19570302.198303.1.001

Dra. Maydian Werdiastuti, M.Si
NIP. 19630509.198811.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dipl. Apling., MA**

Jabatan : **Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc
NIP. 19640310.198811.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak	1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diterapkan	
		2. Jumlah KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak	
		3. Persentase kabupaten/kota menuju KLA	

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak	Rp. 2.601.000.000,-
2. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	Rp. 3.025.000.000,-
3. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak	Rp. 2.600.000.000,-
4. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	Rp. 3.050.000.000,-
5. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla)	Rp. 5.779.800.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc
NIP. 19640310.198811.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Hendra Jamal's, M.Si**

Jabatan : **Asisten Deputi Pemenuhan Hak Kesehatan Anak**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang Bidang Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc
NIP. 19640310.198811.2.001

Drs. Hendra Jamal's, M.Si
NIP. 19621015.198603.1.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya rumusan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak	1. Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	15 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak	2. Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda	25% (17 Dokumen)
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak	2 Model
		4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak	4 Pemda
		5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak	-
		6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang distandarisasi	... % (30 SDM)
3.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah Pemenuhan Hak Kesehatan Anak	7. Jumlah Laporan survai bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak	1 Laporan
		8. Persentase sub sistem data bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak	50% (1 Sub Sistem)
4.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak	9. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak | Rp. 2.601.000.000,- |
|--|---------------------|

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc
NIP. 19640310.198811.2.001

Drs. Hendra Jamal's, M.Si
NIP. 19621015.198603.1.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Dyah Elvina**

Jabatan : **Asisten Deputi Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang Bidang Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc
NIP. 19640310.198811.2.001

Dra. Dyah Elvina
NIP. 19630714.198810.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI LINGKUNGAN DAN PENANAMAN NILAI-NILAI LUHUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya rumusan kebijakan Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	1. Jumlah kebijakan Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	6 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	2. Persentase kebijakan Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur yang terkoordinasi antar KL dan Pemda	25% (17 Dokumen)
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	2 Model
		4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	-
		5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	-
		6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur yang distandarisasi	5% (15 SDM)
		3.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur
8. Persentase sub sistem data bidang Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	50% (2 Sub Sistem)		
4.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur	9. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Lingkungan Dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan Penanaman Nilai-Nilai Luhur | Rp. 3.025.000.000,- |
|--|---------------------|

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc
NIP. 19640310.198811.2.001

Dra. Dyah Elvina
NIP. 19630714.198810.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Dermawan, M.Si**

Jabatan : **Asisten Deputi Partisipasi Anak**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang Bidang Perlindungan Perempuan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc
NIP. 19640310.198811.2.001

Drs. Dermawan, M.Si
NIP. 19630628.198503.1.003



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI PARTISIPASI ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya rumusan kebijakan Partisipasi Anak	1. Jumlah kebijakan Partisipasi Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	18 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak	2. Persentase kebijakan Partisipasi Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda	20% (9 Dokumen)
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak	2 Model
		4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak	-
		5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak	-
		6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Partisipasi Anak yang distandarisasi	12,5% (1 Lembaga, 10 SDM)
		3.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah Partisipasi Anak
8. Persentase sub sistem data bidang Partisipasi Anak	50% (1 Sub Sistem)		
4.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan Partisipasi Anak	9. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Anak yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan

KEGIATAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak

ANGGARAN

Rp. 2.600.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc
NIP. 19640310.198811.2.001

Drs. Dermawan, M.Si
NIP. 19630628.198503.1.003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Elvi Hendrani**

Jabatan : **Asisten Deputi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang Bidang Perlindungan Perempuan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc
NIP. 19640310.198811.2.001

Dra. Elvi Hendrani
NIP. 19631126.198903.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya rumusan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	1. Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	11 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	2. Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda	20% (8 Dokumen)
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	1 Model
		4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	-
		5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	14% (..... K/L,Pemda)
		6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang distandarisasi	20% (120 SDM)
3.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	7. Jumlah Laporan survai bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	1 Laporan
		8. Persentase sub sistem data bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	50% (1 Sub Sistem)
4.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	9. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Rp. 3.050.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc
NIP. 19640310.198811.2.001

Dra. Elvi Hendrani
NIP. 19631126.198903.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rini Handayani, SE, MM**

Jabatan : **Asisten Deputi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc**

Jabatan : **Deputi Bidang Bidang Perlindungan Perempuan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc
NIP. 19640310.198811.2.001

Rini Handayani, SE, MM
NIP. 19690608.199603.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya rumusan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	1. Jumlah kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan	11 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	2. Persentase kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda	20% (2 Dokumen)
		3. Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	2 Model
		4. Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	5 Instansi (5 Pemda)
		5. Persentase KL dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	-
		6. Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang distandarisasi	10% (11 Lembaga, 40 SDM)
3.	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	7. Jumlah Laporan survai bidang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	1 Laporan
		8. Persentase sub sistem data bidang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	50% (1 Sub Sistem)
4.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	9. Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang diselesaikan tepat waktu	1 Laporan

KEGIATAN

1. Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla)

ANGGARAN

Rp. 5.779.800.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc
NIP. 19640310.198811.2.001

Rini Handayani, SE, MM
NIP. 19690608.199603.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Sri Danti, MA**

Jabatan : **Sekretaris Kementerian**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dipl. Apling., MA**

Jabatan : **Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

Dra. Sri Danti, MA
NIP. 19591115.198803.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

SEKRETARIS KEMENTERIAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase (%) rencana program dan anggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis	100%
		2. Persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel	100%
		3. Persentase (%) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum	100%

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat | Rp. 11.000.000.000,- |
| 2. Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program dan Anggaran | Rp. 8.000.000.000,- |
| 3. Pengembangan SDM, administrasi, dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kementerian PP dan PA | Rp. 65.723.600.000,- |
| 4. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KPP dan PA | Rp. 2.000.000.000,- |
| 5. Telaahan PP dan PA | Rp. 4.750.000.000,- |

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dra. Sri Danti, MA
NIP. 19591115.198803.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ratna Susianawati, SH, MH**

Jabatan : **Kepala Biro Hukum dan Humas**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dra. Sri Danti, MA**

Jabatan : **Sekretaris Kementerian**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dra. Sri Danti, MA
NIP. 19591115.198803.2.001

Ratna Susianawati, SH, MH
NIP. 19720227.199703.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BIRO HUKUM DAN HUMAS

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum	1. Persentase (%) peraturan perundang-undangan lainnya dan produk hukum di internal KPP dan PA yang sesuai dengan rencana kerja tahunan	100% (14 Dokumen)
		2. Persentase (%) Berita terkait KPP dan PA yang didistribusikan dan direspon pada periode waktu yang telah ditentukan	100% (11 Dokumen)
		3. Persentase (%) dokumen Pengaduan kekerasan Perempuan dan Anak yang diselesaikan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan	100% (16 Dokumen)

KEGIATAN

1. Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat

ANGGARAN

Rp. 11.000.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dra. Sri Danti, MA
NIP. 19591115.198803.2.001

Ratna Susianawati, SH, MH
NIP. 19720227.199703.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Valentina Gintings, Msi**

Jabatan : **Kepala Biro Perencanaan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dra. Sri Danti, MA**

Jabatan : **Sekretaris Kementerian**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dra. Sri Danti, MA
NIP. 19591115.198803.2.001

Dra. Valentina Gintings, Msi
NIP. 19630429.199003.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BIRO PERENCANAAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi, dan harmonis	1. Persentase (%) dokumen rencana Program, Kegiatan dan anggaran yg disusun dan diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana kerja tahunan	100% (13 Dokumen)
		2. Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah disusun	100% (9 Dokumen)
		3. Persentase (%) Dokumen penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja dan RB yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan road map reformasi briokrasi Kemen PPPA	100% (10 Dokumen)
		4. Persentase (%) Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran yang disusun dan ditindaklanjuti	100% (9 Dokumen)

KEGIATAN

1. Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program dan Anggaran

ANGGARAN

Rp. 8.000.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Dra. Sri Danti, MA
NIP. 19591115.198803.2.001

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dra. Valentina Gintings, Msi
NIP. 19630429.199003.2.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Indra Gunawan, SKM, MA**

Jabatan : **Kepala Biro Umum**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dra. Sri Danti, MA**

Jabatan : **Sekretaris Kementerian**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dra. Sri Danti, MA
NIP. 19591115.198803.2.001

Indra Gunawan, SKM, MA
NIP. 19720425.199803.1.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BIRO UMUM

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel	1. Presntase (%) Laporan pengelolaan administrasi dan pengembangan SDM sesuai dengan aturan yang ada	100% (6 Dokumen)
		2. Presntase (%) laporan keuangan yg disusun sesuai dengan aturan yang ada	100% (6 Dokumen)
		3. Jumlah bulan layanan perkantoran yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku	12 Bulan
		4. Jumlah bulan layanan TU pimpinan yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku	12 Bulan

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pengembangan SDM, administrasi, dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kementerian PP dan PA | Rp. 65.723.600.000,- |
|--|----------------------|

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Dra. Sri Danti, MA
NIP. 19591115.198803.2.001

Indra Gunawan, SKM, MA
NIP. 19720425.199803.1.001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Retno Adji Prasetiaju, S.H**

Jabatan : **Kepala Sekretariat KPAI**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dipl. Apling., MA**

Jabatan : **Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

Retno Adji Prasetiaju, S.H
NIP. 19581002.198703.2.001



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
SEKRETARIA KOMISI PELINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pengawasan, Penelaahan, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Penyelenggara PA	1. Jumlah Provinsi sebagai target Pengawasan dan monev penyelenggaraan PA	9 Prov
2.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait PA	2. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kepada stakeholder terkait PA	9 Prov
3.	Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi terkait PA	3. Jumlah Laporan data dan informasi serta saran, masukan dan pertimbangan	2 Lap
4.	Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat	4. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	20 %
		5. Jumlah Laporan Akuntabilitas dan kinerja organisasi KPAI	1 Lap
5.	Terlaksananya Layanan Perkantoran	6. Jumlah bulan layanan perkantoran	12 Bln

KEGIATAN

1. Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI)

ANGGARAN

Rp. 12.000.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, Januari 2015

Pimpinan Unit Kerja

Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

Retno Adji Prasetyaju, S.H
NIP. 19581002.198703.2.001